

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia adalah ketersediaan guru yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan guru yang memadai dihadapkan pada dua masalah pokok, yakni pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan peningkatan kualitas profesional yang belum memenuhi standar minimal. Kedua permasalahan inilah yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya disparitas kualitas guru di berbagai daerah di tanah air. Di lain pihak pemenuhan kebutuhan guru secara nasional ini, juga akan sangat dipengaruhi oleh sistem dan kebijakan pendidikan guru sebagai institusi pendidikan tenaga kependidikan yang berkompeten dalam “mencetak” guru yang memenuhi persyaratan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kebijakan-kebijakan yang ada sampai saat ini seringkali tidak seimbang untuk menjawab kedua permasalahan di atas. Kebijakan itu lebih condong pada upaya peningkatan kuantitas dan bukan kualitas. Permasalahan lain berkenaan dengan guru adalah penyebaran guru tidak merata. Di daerah-daerah ada yang kekurangan guru, secara nasional mencapai 156.454 orang sedangkan ada daerah lain yang kelebihan guru sebanyak 12.917 orang (BKN, 1997). Begitu juga jika dilihat dari tingkat pendidikan guru, masih terdapat sejumlah guru SD yang memiliki kualifikasi ijazah yang kurang sesuai dengan persyaratan untuk mengajar di SD/MI (Fasli Jalal, 2001).

Dalam dimensi pendidikan, banyak variabel yang memberi pengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan. Beberapa variabel tersebut antara lain: guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta manajemen yang digunakan. Dalam kaitannya dengan mutu, studi yang dilakukan The World Bank (1995, 1998)

menyebutkan ada delapan faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan dasar (persekolahan) di Indonesia, yaitu; manajemen sekolah, struktur insentif, kualifikasi guru, waktu belajar, keuangan sekolah, ketersediaan buku dan bahan ajar, sistem monitoring dan evaluasi, dan sistem manajemen lembaga.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, bentuk-bentuk penyelenggaraan sistem pendidikan profesi keguruan semakin variatif pasca dikeluarkannya keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud, ketika itu banyak bentuk pendidikan keprofesian diberhentikan, termasuk Sekolah Pendidikan Keguruan baik yang ada di Lingkungan Departemen Pendidikan maupun Departemen Agama seperti SPG, SGO, PGA, dan sejenisnya. Pergeseran fenomena ini membawa dampak kepada peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) pada waktu itu masih bernama Institut, diantaranya IKIP yang ada di seluruh Indonesia untuk segera mampu mengadopsi arah kebijakan pencetakan calon guru mulai dari calon guru pendidikan Dasar, walaupun pada waktu itu program Diploma I, II dan III dengan PGSMMP, PGSMMA-nya sudah dilaksanakan yang diantaranya oleh UPI yang pada waktu itu masih IKIP. Penyelenggaraan pendidikan guru “crash program” dilakukan melalui kerjasama Universitas/Institut penyelenggara dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/kota.

Pergeseran kebijakan dan perundang-undangan terus berjalan seiring dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pada waktu itu dijabat Prof. Dr. Wardiman, mulai menerapkan sistem ganda, dimana dunia pendidikan harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri atau dikenal dengan istilah *link and match*. Secara sederhana konsep ini juga mempengaruhi arah kebijakan dan bentuk program pendidikan keguruan di tanah air, termasuk IKIP di seluruh Indonesia, diantaranya IKIP Bandung. Dampak terhadap pola dan bentuk serta model penyelenggaraan pendidikan profesi keguruan semakin berkembang. Perkembangan tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan perguruan tinggi non LPTK untuk bersama-sama mencetak calon guru, hingga universitas di luar LPTK pada waktu itu berani mencetak calon guru dengan sistem Akta Mengajar. Namun dalam aspek kualitas dan nilai-nilai pedagogiknya

ternyata belum bisa teruji secara utuh, hingga kebijakan baru muncul dan pola tersebut diberhentikan.

Hingga dekade tahun 1980- hingga sekarang dinamika pendidikan guru terus berlanjut, mulai dari perubahan-perubahan nama, peran, model dan bentuk penyelenggaraan pendidikan profesi keguruan. Namun demikian, setiap bentuk dan model penyelenggaraan pendidikan profesi keguruan ini masih terus berubah, dan terus menjadi wacana akademik-ilmiah bagi para pakar pendidikan.

Jika dilihat dari variasi atau bentuk model penyelenggaraan pendidikan profesi keguruan, termasuk di UPI sebagai salah satu LPTK, ada sejumlah bentuk, model, dan sistem penyelenggaraan pendidikan guru, antara lain :

- 1) Reguler Akademik mencakup:
 - (a) Program PGSD;
 - (b) Program Pendidikan Bidang Studi pada tiap Fakultas.
- 2) Non Reguler atau Penyetaraan Kualifikasi S-1 bagi Guru SD, SMP, SMA, terdiri atas:
 - (a) PGSD Kerjasama dengan Pemda Ka/Kota;
 - (b) PGSD Berasrama
 - (c) PGSD Lanjutan;
 - (d) PGSD PJJ
 - (e) PGSD Dualmodus
 - (f) PGSMP
 - (g) PGSMA
- 3) Program Akta, yaang mencakup:
 - (a) Akta IV Bidang studi
 - (b) Akta IV diklat
 - (c) Akta IV kerjasama Pusdiklat
- 4) Program Baru yang akan Dikembangkan yaitu Program Profesi Guru, mencakup:
 - (a) PPG (Pendidikan Profesi Guru)
 - (b) PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru)

Dari empat bentuk besaran model penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi keguruan tersebut, kualitas lulusannya masih juga perlu diuji tingkat profesionalitasnya, termasuk untuk program Reguler dan Non Reguler yang lulusannya harus mengikuti ujian Sertifikasi Guru, mulai dari guru Sekolah Dasar hingga guru Sekolah menengah atas.

Melalui pendekatan program peningkatan profesionalitas guru ini, hampir semua LPTK termasuk UPI, telah melakukan upaya sistemik untuk menyesuaikan sistem dan model-model penyelenggaraan pendidikan guru yang diharapkan mampu memenuhi standar profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Langkah-langkah strategis ini diantaranya mengembangkan model penyelenggaraan pendidikan calon guru dalam bentuk yang dilakukan melalui sistem *pre service*, *on service* maupun *pasca lulusan* dalam menyelesaikan program pendidikannya baik reguler maupun nonreguler, yang mencakup:

- (1) PPG dengan SPPG-nya (sedang diujicobakan baru di PGSD).
- (2) PLP
- (3) PPL-2 (model asumsi seiring dengan adanya PPG)
- (4) PPL dan Micro Teaching (selama ini telah dilaksanakan sejak lama)
- (5) PLPG yang dilaksanakan pasca Sertifikasi (penilaian Fortofolio)
- (6) Matrikulasi
- (7) Minor/konsentari

Kajian terhadap model penyelenggaraan pendidikan profesi guru tersebut setidaknya telah menyimpan sejumlah tugas dan pekerjaan rumah tersendiri bagi semua LPTK yang sedang melaksanakannya termasuk UPI Bandung. Salah satu tugas penting bagi UPI diantaranya harus mampu membentuk suatu sistem penyelenggaraan pendidikan keprofesian guru secara komprehensif mencakup semua model yang selama ini telah, sedang dan akan dikembangkan, sebagaimana telah diuraikan dalam 5 model di atas. Hal ini sangat penting untuk segera dilakukan, mengingat tuntutan dari dirjen PMPTK yang telah lama mengeluarkan kebijakan bahwa seorang guru akan dapat dikatakan profesional jika ia telah lolos

dalam uji portofolio yang dinilai dalam sistem sertifikasi guru oleh asesor yang diselenggarakan oleh LPTK, dan diantaranya UPI. Setelah dinyatakan lulus maka seorang guru berhak untuk memperoleh sertifikat tanda lulus uji kompetensi profesionalitasnya sebagai guru yang profesional. Demikian juga ketika ia tidak lulus maka ia harus masuk ke dalam sistem Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dengan mengikuti sejumlah pendalaman dalam bidang studi yang sesuai dengan latar belakang keilmuannya yang kemudian mengikuti peer teaching hingga lulus ujian tertulis dan ujian praktek mengajar.

Dari uraian fenomena yang telah diuraikan di atas maka kiprah UPI sebagai salah satu LPTK, harus menemukan dan menegaskan suatu model Sistem Pendidikan Keprofesionalan Guru yang betul-betul bisa dijadikan andalan dalam mencetak guru-guru yang profesional. Khususnya sistem tersebut harus mampu menguji baik untuk kepentingan Pendidikan Dalam Jabatan, maupun pendidikan Prajabatan, khususnya yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan kualitas dan kualifikasi yang dibutuhkan di persekolahan.

Upaya merumuskan, mendisain, menguji model hingga mendiseminasikan model sistem Pendidikan Keprofesionalan Guru inilah yang akan memerlukan suatu studi yang panjang dan komprehensif sehingga akan melibatkan para pakar pendidikan keguruan sehingga temuannya mampu memenuhi tuntutan arah dan kebijakan LPTK, termasuk UPI dalam mencetak tenaga guru yang profesional. Dalam studi ini, peneliti akan melakukan serangkaian kajian dokumentasi dan kajian lapangan, serta analisis terhadap beberapa argumentasi dan pendapat para stakeholder pendidikan, organisasi, serta strata praktisi dan tenaga pendidikan dan kependidikan yang berada di luar lingkungan LPTK. Studi ini sangat penting mengingat gejolak dan desakan dari pihak-pihak tertentu diasumsikan tidak memiliki sudut pandang dan pemikiran yang sama terhadap apa yang telah dan akan dikembangkan oleh UPI di masa yang akan datang.

Berdasarkan fenomena dan pemikiran-pemikiran di atas maka berikut ini adalah fokus penelitian yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan tahapan riset secara lebih spesifik dan mendalam mengenai pendidikan keguruan ini, baik itu

yang termasuk pendidikan akademik maupun keprofesiannya yaitu mengenai: **“Kajian Kondisi Existing Pendidikan Tenaga Kependidikan oleh UPI semasa IKIP, UPI sebelum BHMN dan UPI BHMN Berbasis Standar Kompetensi dan Kualifikasi”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam payung penelitian ini diantaranya diklasifikasikan ke dalam sub-sub masalah penelitian baik selama existing UPI semasa IKIP maupun semasa UPI sebelum dan setelah BHMN. Adapun klasifikasi masalah dalam payung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat masyarakat tentang kelembagaan pendidikan yang diselenggarakan IKIP/UPI?
2. Bagaimana persepsi pengguna lulusan (stakeholders) terhadap kinerja lulusan IKIP/UPI di lingkungan pekerjaan?
3. Model penyelenggaraan Pendidikan Keguruan seperti apakah yang dapat dikonstruksi berdasarkan atas persepsi dan harapan masyarakat pendidikan baik internal maupun eksternal dari kelembagaan UPI di masa yang akan datang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan oleh UPI sebagai LPTK yang mengemban amanat bangsa dalam mencetak calon guru dan meningkatkan kualitas tenaga guru di Indonesia. Dengan demikian tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui tahapan penelitian ini meliputi:

1. Terkumpulnya data pendapat masyarakat tentang layanan kelembagaan yang dilakukan semasa IKIP dan UPI.
2. Terkumpulnya data persepsi stakeholders terhadap kinerja lulusan IKIP/UPI di lingkungan pekerjaan.
3. Diperolehnya Model hipotetik mengenai model penyelenggaraan pendidikan Keguruan yang dapat dikembangkan oleh UPI di masa yang akan datang

berdasarkan atas dukungan pendapat dan harapan masyarakat pendidikan dari internal maupun eksternal UPI.

D. Fokus Kajian

Penelitian tentang “Kondisi Existing UPI masa IKIP hingga UPI BHMN dalam rangka Perumusan Model Pendidikan Guru dan Pendidikan Profesi Keguruan Berbasis Standar Kompetensi dan Kualifikasi”, akan difokuskan terhadap kajian-kajian mengenai: Kondisi Existing peran LPTK UPI semasa IKIP, UPI sebelum BHMN dan UPI setelah BHMN dalam mencetak Tenaga Profesional Pendidikan dan Kependidikan.

E. Hasil Yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa temuan baik yang mencakup tahapan analisa, disain, model implementasi, serta upaya pengembangan dari sistem penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia, sehingga menjadi dasar kebijakan serta pandangan dan upaya strategis yang dapat dilakukan oleh UPI. Adapun hasil-hasil yang dihadapkan tersebut mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Kondisi kongkrit dari existing kelembagaan penyelenggaraan pendidikan keguruan yang ada di UPI sebagai LPTK semasa IKIP, UPI sebelum menjadi BHMN dan masa UPI setelah menjadi berdasarkan atas kekuatan dan dukungan masyarakat pendidikan baik masyarakat internal dari lingkungan UPI maupun eksternal dari luar lingkungan UPI, khususnya lembaga-lembaga pendidikan pengguna lulusan UPI .
- 2) Beberapa indikator yang akan dijadikan standar perumusan model hipotetik dalam penyelenggaraan pendidikan keguruan oleh UPI di masa yang akan datang.
- 3) Raw input dari strategi perumusan model penyelenggaraan pendidikan keguruan oleh UPI sebagai bahan riset selanjutnya untuk memperoleh model yang siap diimplementasikan.

F. Anggapan Dasar Penelitian

Merujuk permasalahan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka beberapa asumsi dalam pengembangan model ini dirumuskan berikut ini.

1. Posisi guru dalam kelompok pada umumnya terdapat sebutan yang berjenjang, yaitu kelompok pada tingkat guru utama, guru pembina, guru madya dan guru muda; Keempat unsur tingkatan guru tersebut, pada umumnya mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama, yang berbeda hanya bobot peran yang dilakukan dari setiap tugas pokok dan fungsi tersebut;
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut pada umumnya diidentikan dengan profesi yang berbentuk *penampilan mengajar* guru pada saat proses, hasil langsung (*output*), dan hasil ahir (*outcomes*) dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut;
3. Ditinjau dari aspek produktivitas pelaksanaan mengajar, penampilan mengajar (*performance*) guru tersebut dapat diamati dari komponen (1) kemampuan dalam melaksanakan tugas (*ability*) dan (2) dorongan untuk melaksanakan pemengajaran (*motivation*);
4. Kedua unsur profesi ini, bila ditinjau dari aspek posisi individu dalam tingkatan organisasi, sering disebut dengan profesi (*competencies*).
5. Seperangkat profesi tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari perolehan pengetahuan (*knowledge*), apresiasi (*appretiation*) dan keterampilan (*skills*).
6. Kompetensi (*competencies*), dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: (1) kompetensi pribadi (*personal competencies*), (2) kompetensi profesional (*professional competencies*), dan (3) kompetensi sosial (*social competencies*);
7. Akumulasi dan internalisasi profesi personal, profesional dan sosial dari seorang guru secara praktis akan tergambar dalam aspek *perilaku* (*behavior*), baik pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsi (*task behavior*) dan pada saat berhubungan antar manusia (*humans behavior*) di lingkungan pemengajarannya;

8. Analisis profesi guru diartikan sebagai proses perilaku tugas (*task behavior*) dan perilaku hubungan antar manusia (*humans behavior*) yang terakumulasi dalam *kepribadian (personality)* sebagai guru.
9. Merumuskan standar *profesi* guru diartikan sebagai perumusan norma yang dijadikan tolok ukur kemampuan berperilaku dalam melaksanakan tugas pengajaran. Karena itu, standar profesi tersebut harus dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi profesi, yang harus pula disertai perumusan instrumen dan prosedur pelaksanaannya.